



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS PERSATUAN GURU 1945 NTT**

**TENTANG**

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: **11.9. 3 /UN32.1/KS/2023**

NOMOR: **107/D-FKIP UPG. 1945 NTT/IX/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas, bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Temy M. E. Ingunau, S. Pd., M.M, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Persatuan Guru 1945 NTT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, berkedudukan di JL. P. A. Manafe No. 7 Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di bidang Pendidikan yang berada di Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 NTT.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Bidang Penelitian;
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program tri dharma perguruan tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran
  - a) Kuliah tamu, Kuliah pakar, Dosen Pembimbing, Seminar/Konferensi Ilmiah, dan Rekognisi;
  - b) Pertukaran mahasiswa dalam rangka program Merdeka belajar-Kampus Merdeka;
  - c) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
- (2) Penelitian
  - a) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
  - b) Pertukaran editor dan reviewer jurnal;
  - c) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
  - d) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat
  - a) Kerjasama dalam melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
  - b) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

**PASAL 3**  
**TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program tri dharma perguruan tinggi

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

/

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
  - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Program tri dharma perguruan tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

#### **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah disepakati di dalam RAB.

#### **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada **PIHAK KEDUA**;

- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan tri dharma perguruan tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan tri dharma perguruan tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya Program tri dharma perguruan tinggi berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program tri dharma perguruan tinggi berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program tri dharma perguruan tinggi;
- (12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program tri dharma perguruan tinggi diterima;
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program tri dharma perguruan tinggi kepada masing-masing **PIHAK**;
- (15) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program tri dharma perguruan tinggi; dan
- (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

**Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**  
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Persatuan Guru 1945 NTT**

JL. P. A. Manafe No. 7, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo  
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd**  
NIP 197304132003121001

**PIHAK KEDUA**

Dekan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan  
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT



**Temy M. E. Ingunau, S. Pd., M.M**

**SAKSI PIHAK KESATU**

Ketua Program Studi  
S1 Bimbingan dan Konseling  
Universitas Negeri Malang

**Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd.,  
M.Pd**

NIP 198606172014041001

**SAKSI PIHAK KEDUA**

Ketua Program Studi  
Bimbingan dan Konseling  
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

**Ferdinan Leonardus Lopo, S.Pd.,  
M.Pd**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

